



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Pelatihan Kepemimpinan Pengawas
Angkatan 31, Tahun 2021

PENYUSUNAN RKA PELAYANAN PUBLIK

Dr. Ir. Sri Mahendra Satria Wirawan, MM, MT, IPU



WIDYAISWARA
AHLI MADYA
B P S D M
PROVINSI DKI JAKARTA



mahendrawirawan@gmail.com



085100208556



<https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=roM-I24AAAAJ>



SINTA ID : 6727304



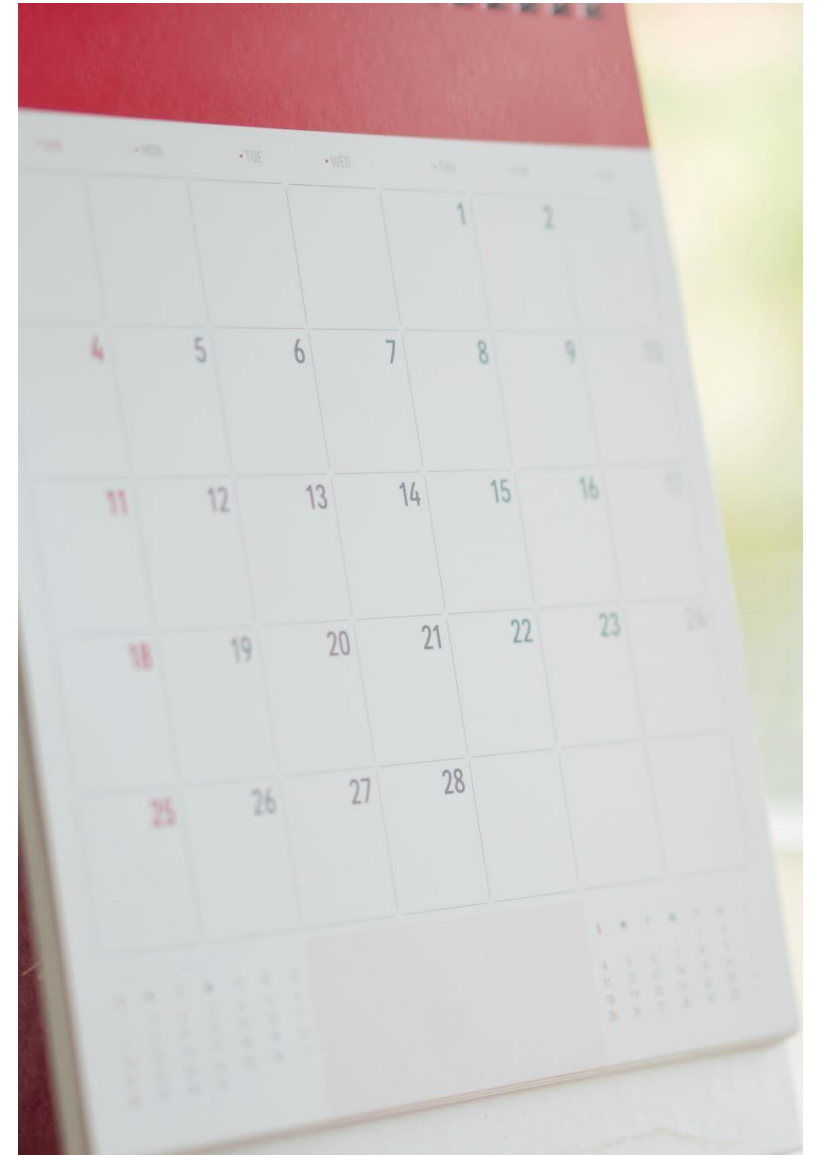
<https://www.wirakarta.com>

Dr. Ir. Sri Mahendra Satria Wirawan, MM, MT, IPU



AGENDA PEMBELAJARAN

WIB	WITA	WIT	
08.00 - 10.00	9.00 - 11.00	10.00 - 12.00	Penyampaian Materi
10.00 - 10.15	11.00 - 11.15	12.00 - 12.15	Pembagian Kelompok & Penugasan
10.15 - 14.30	11.15 - 15.30	12.15 - 16.30	Ishoma & Diskusi Kelompok
14.30 - 14.50	15.30 - 15.50	16.30 - 16.50	Paparan Kel.1, Penanggap Kel. 2
14.50 - 15.10	15.50 - 16.10	16.50 - 17.10	Paparan Kel. 2, Penanggap Kel. 3
15.10 - 15.30	16.10 - 16.30	17.10 - 17.30	Paparan Kel. 3, Penanggap Kel. 4
15.30 - 15.50	16.30 - 16.50	17.30 - 17.50	Paparan Kel. 4, Penanggap Kel. 1
15.50 - 16.20	16.50 - 17.20	17.50 - 18.20	Evaluasi dan review
16.20 - 16.30	17.20 - 17.30	18.20 - 18.30	Evaluasi dan Penutup



PRE-TEST



<https://www.wirakarta.com>

DASAR HUKUM

1

UU No.17 Tahun 2003

2

UU No.25 Tahun 2004

3

UU No.23 Tahun 2014

4

PP No.8 Tahun 2008

5

PP No.90 Tahun 2010

6

PP No.12 Tahun 2019

7

Permendagri No.86 Tahun 2017

8

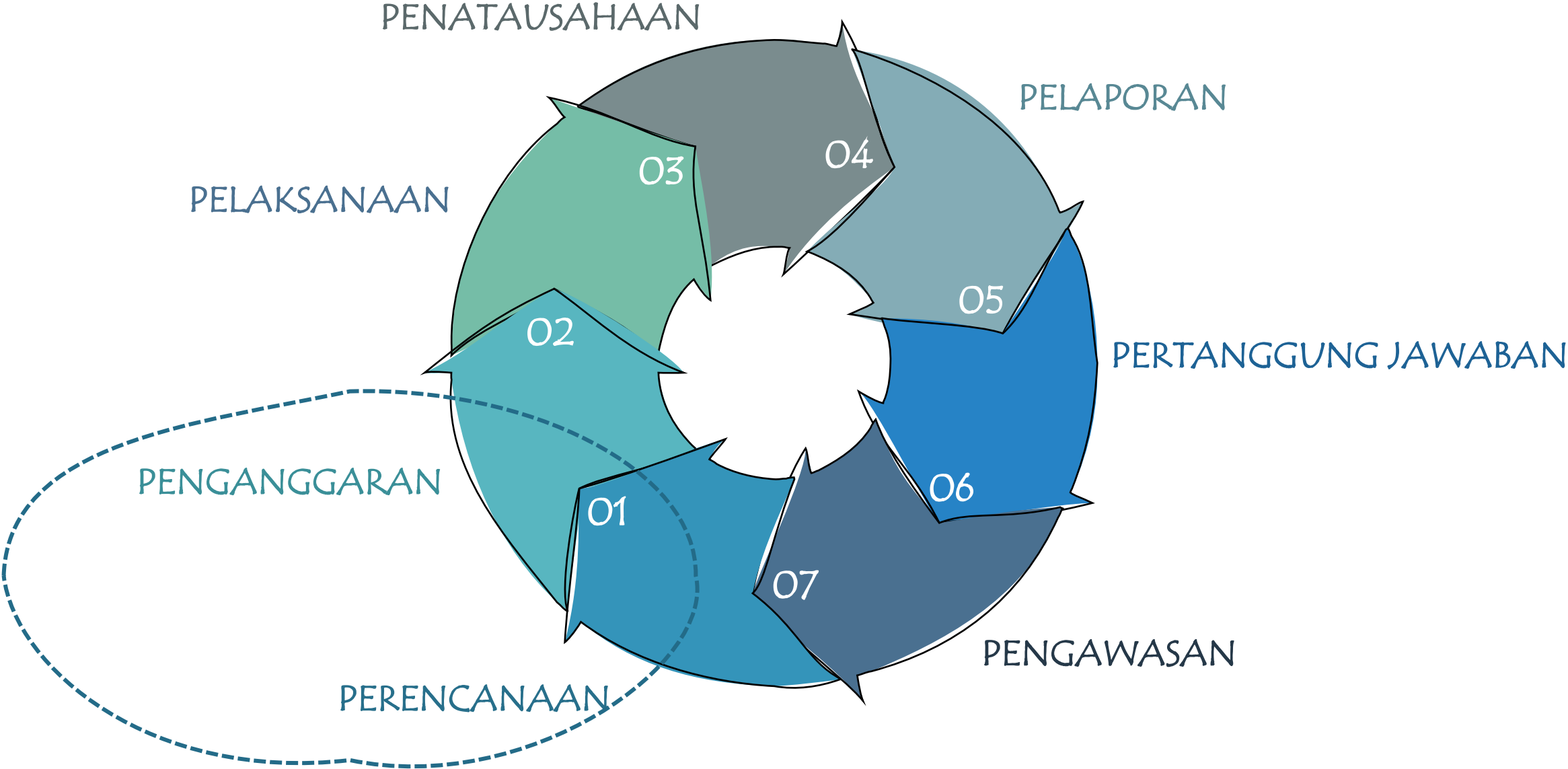
Permen PPN No.5 Tahun 2019

9

Permenkeu No.208/PMK/2019

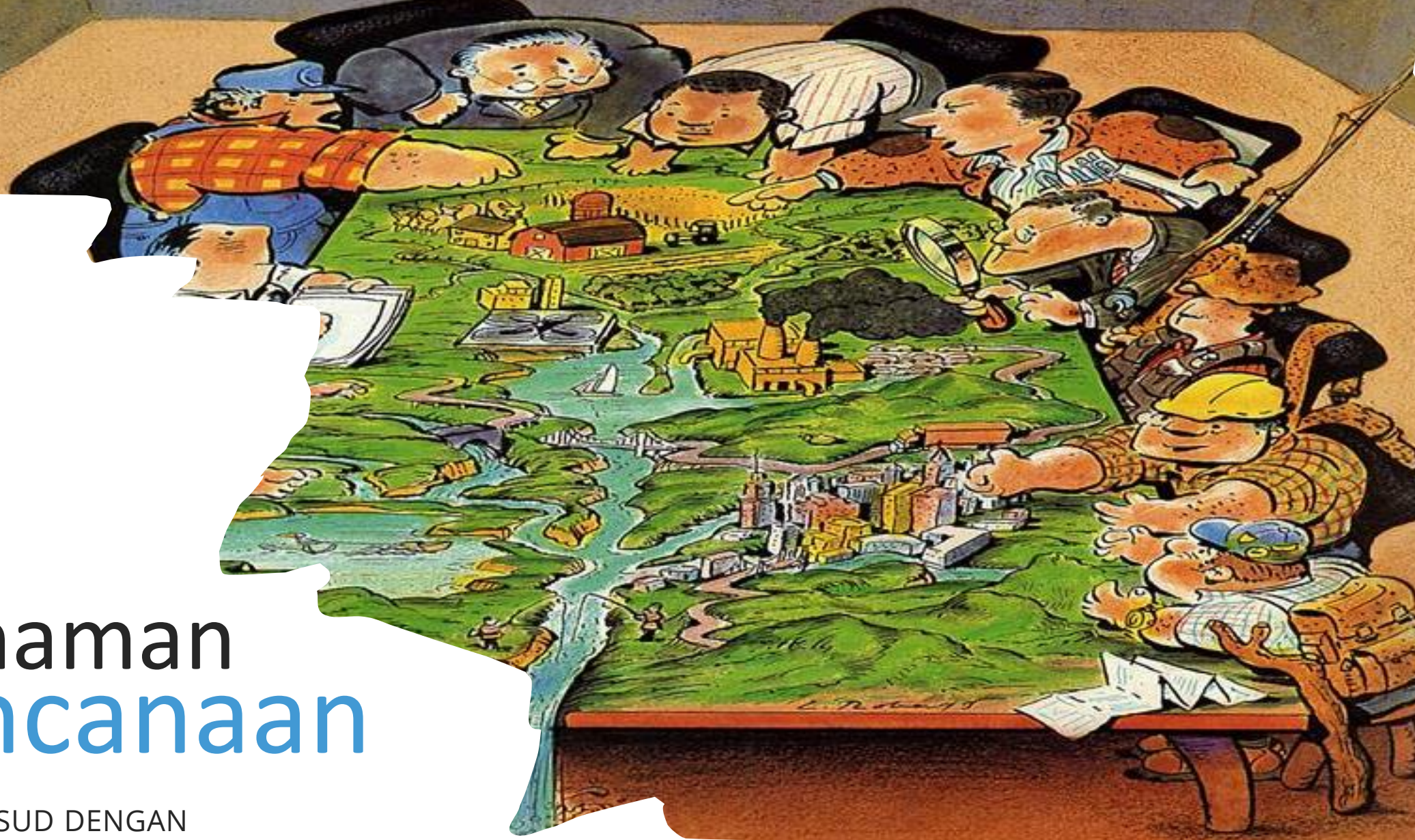


PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA



Pemahaman Perencanaan

APA YANG DIMAKSUD DENGAN
PERENCANAAN



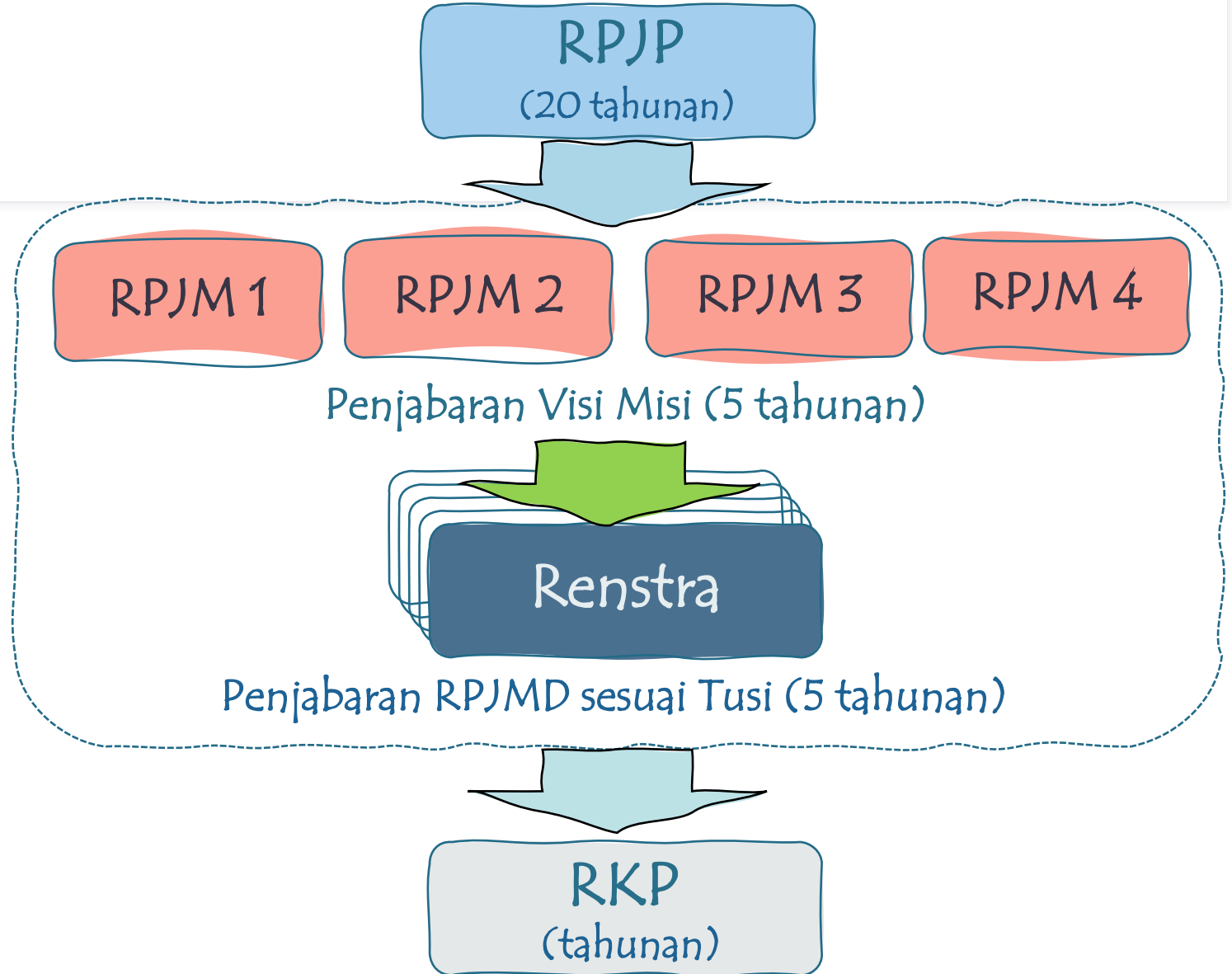
Perencanaan

UU No. 25 Tahun 2004

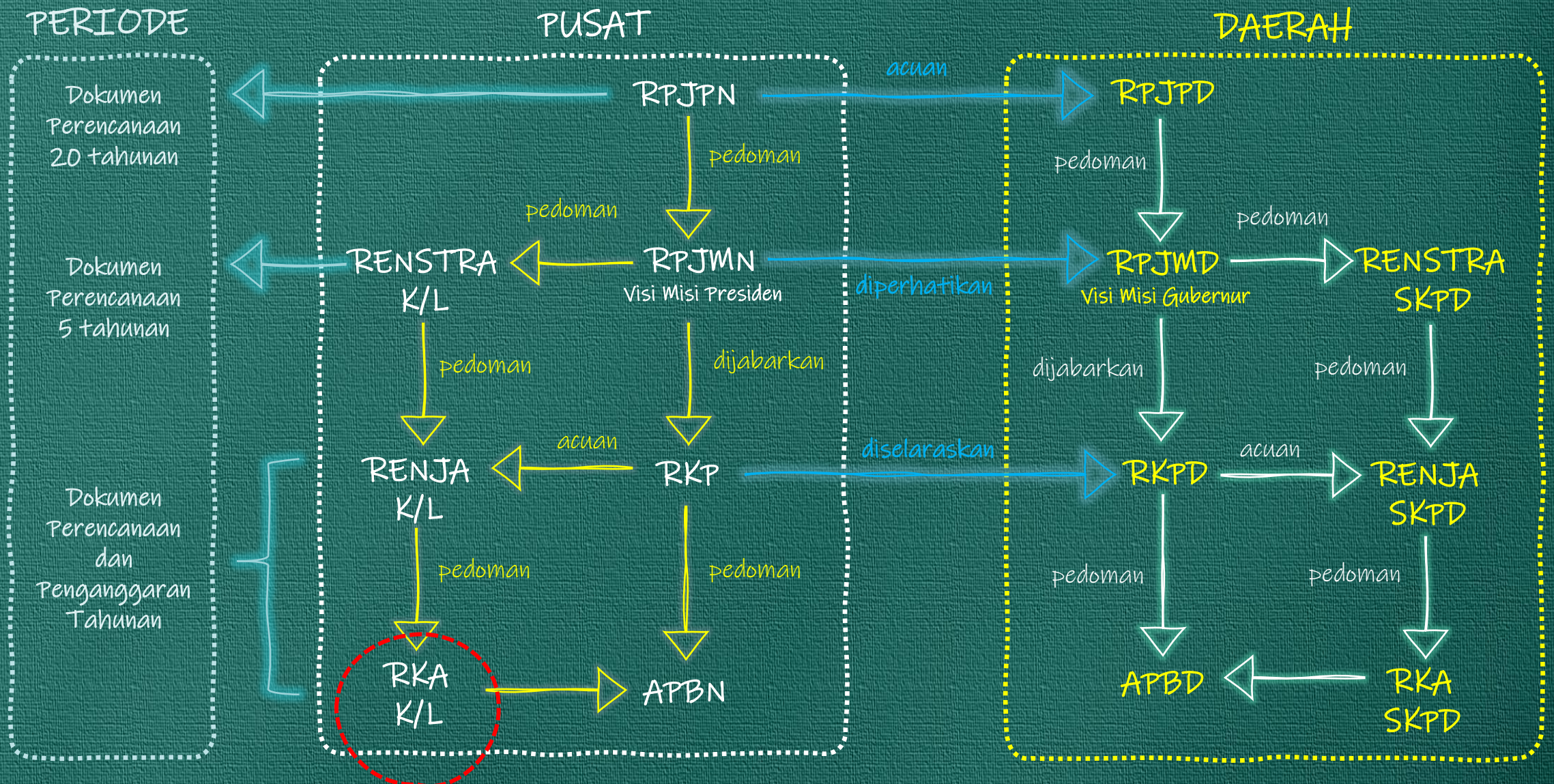
Suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.



Hirarki Dokumen Perencanaan



Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



PENDEKATAN PROSES PERENCANAAN

POLITIS

KETERLIBATAN DPR/D

Pembahasan dengan DPR/D

TEKNOKRATIS

ILMIAH

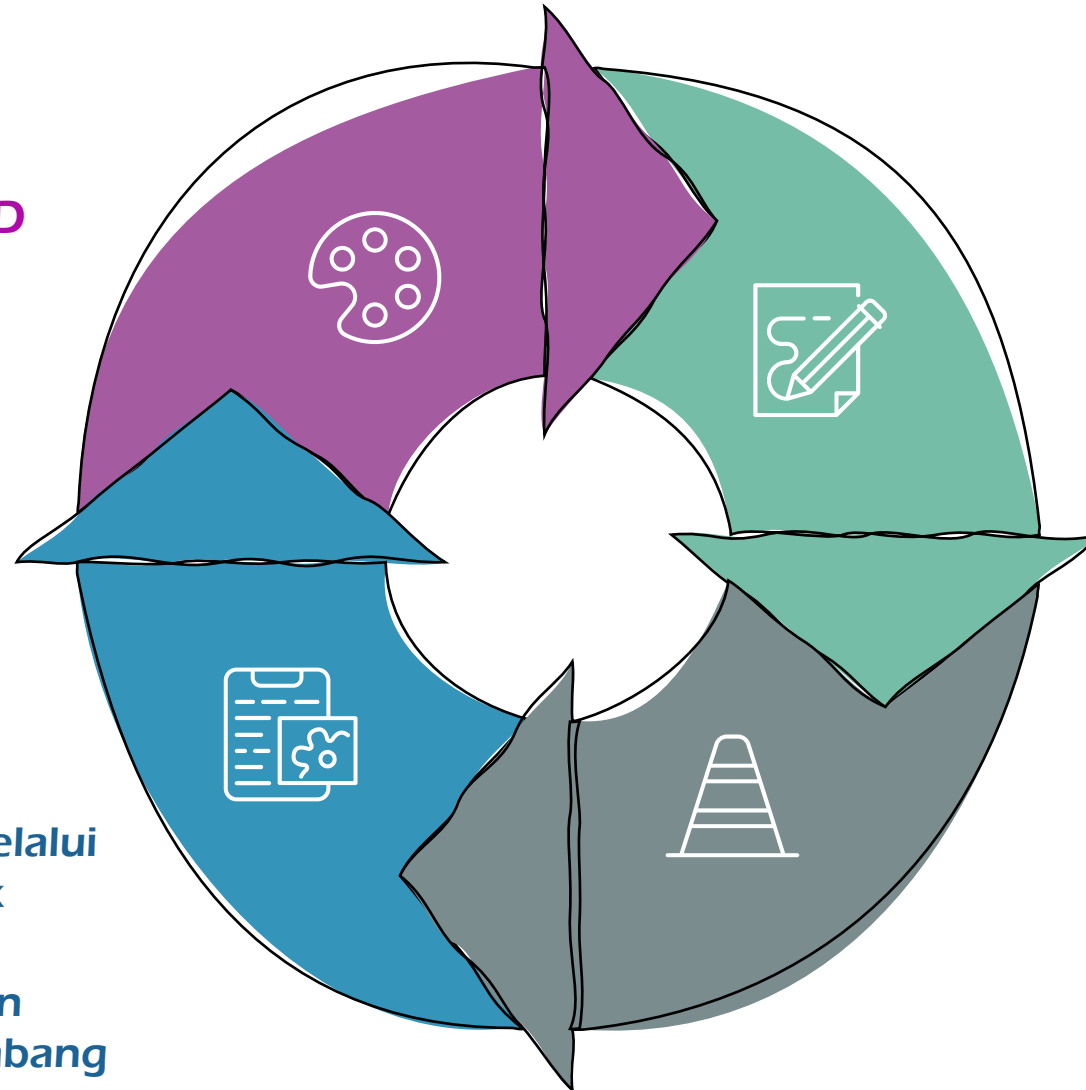
Pengkajian dokumen yang menjadi referensi (RPJM, RPJP, RTRW, RKP).

BOTTOM UP/ TOP DOWN

- **MASYARAKAT**
Penjaringan aspirasi melalui forum konsultasi publik
- **PEMERINTAH**
Antisipasi isu aktual dan kebijakan yang berkembang

PARTISIPATIF

PELIBATAN STAKEHOLDER
Pelaksanaan Musrenbang yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (Daerah, K/L, Asosiasi Profesi, Pakar, Akademisi, LSM, NGO dll).



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

UU 25/2004

NASIONAL

Merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional.

DAERAH

Visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

UU 25/2004

NASIONAL

Merupakan penjabaran dari **visi, misi, dan program Presiden** serta berpedoman pada **RPJP Nasional**, yang memuat

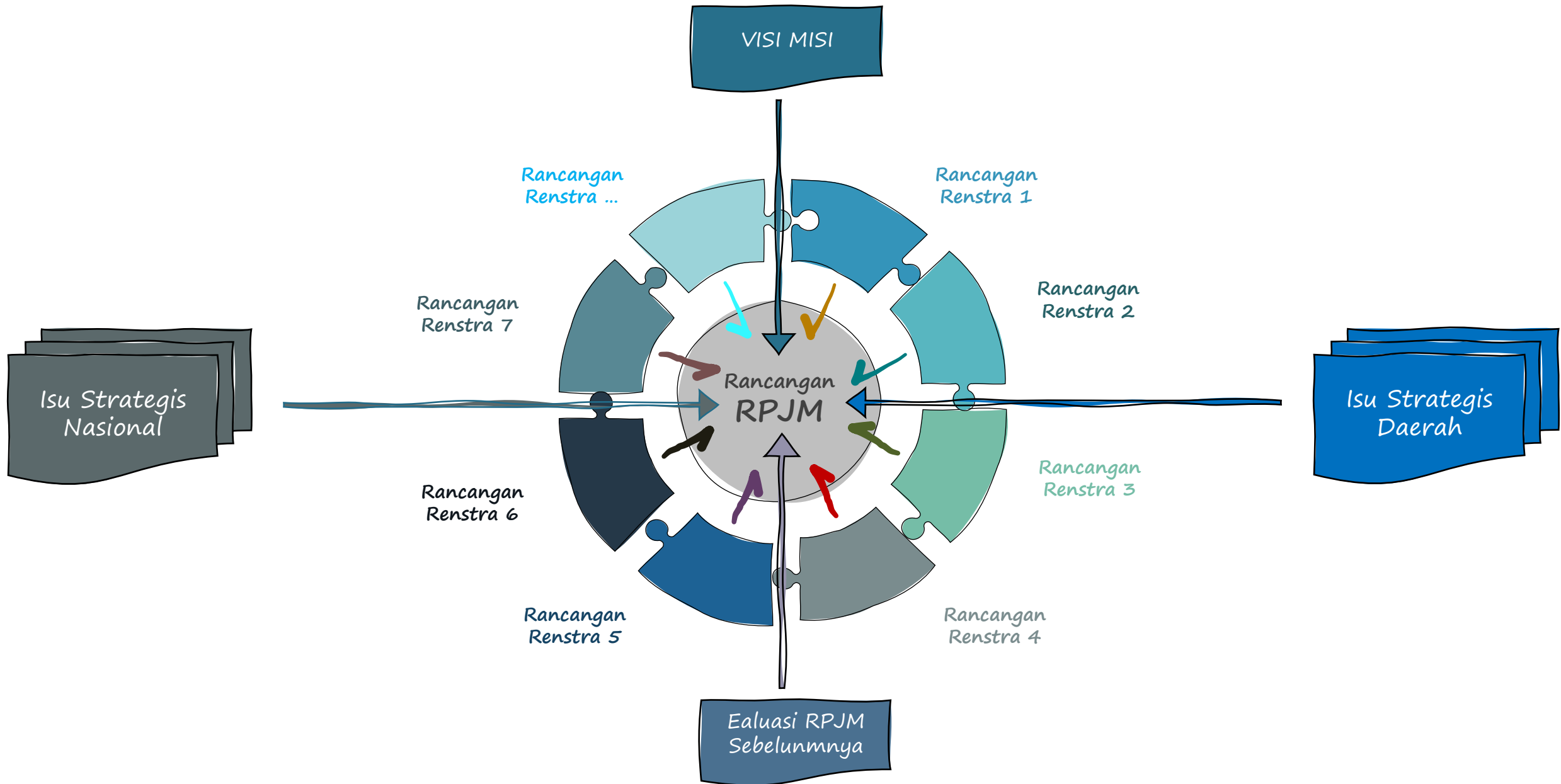
- strategi pembangunan Nasional,
- kebijakan umum,
- program KL dan lintas KL,
- kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta
- kerangka ekonomi makro termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan **kerangka pendanaan yang bersifat indikatif**.

DAERAH

Merupakan penjabaran dari **visi, misi, dan program Kepala Daerah**, berpedoman pada **RPJP Daerah** serta memperhatikan **RPJM Nasional**, memuat

- arah kebijakan keuangan Daerah,
- strategi pembangunan Daerah,
- kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD, dan
- program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan **kerangka pendanaan yang bersifat indikatif**.

Proses Penyusunan RPJM



RENCANA STRATEGIS

UU 25/2004

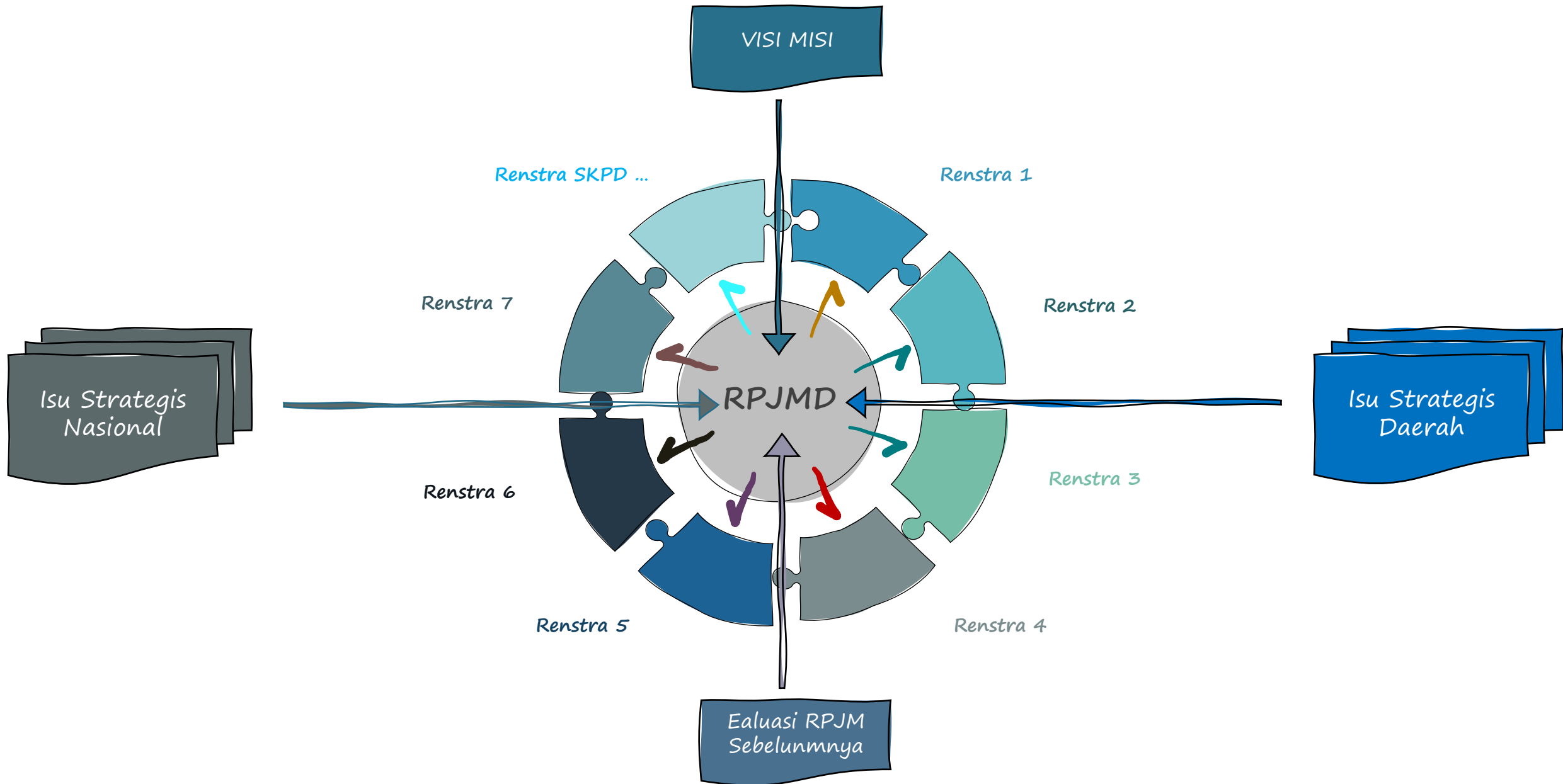
NASIONAL

Memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L yang disusun dengan **berpedoman pada RPJM Nasional** dan bersifat indikatif.

DAERAH

Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta **berpedoman kepada RPJM Daerah** dan bersifat indikatif.

Proses Penyusunan Renstra





VISI

Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

MISI



Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia



Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing



Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan



Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan



Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa



Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya



Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga



Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

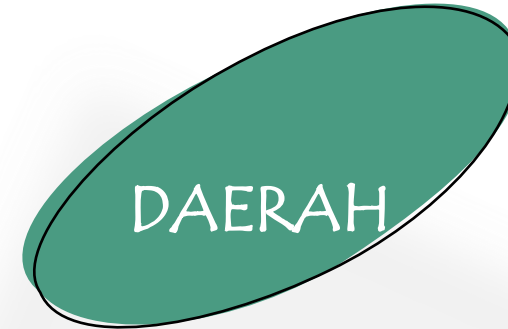
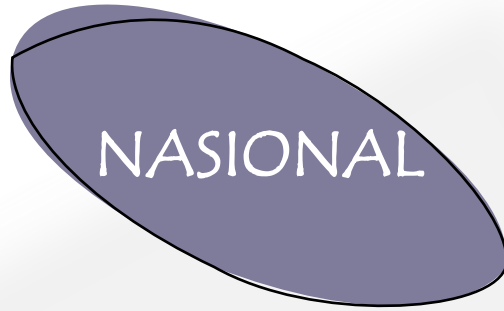


Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

RPJMN 2020-2024

RENCANA KERJA PEMERINTAH

UU 25/2004



Penjabaran dari RPJMN, memuat:

- prioritas pembangunan,
- rancangan kerangka ekonomi makro secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, program K/L, lintas K/L, kewilayahan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat

- rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas
- pembangunan Daerah,
- rencana kerja, dan pendanaannya.

Renja K/L → RKA K/L

APBN

Renja SKPD → RKA SKPD

APBD

URUSAN PEMERINTAHAN

UU 23/2014

KONKUREN
(Pusat dan Daerah)

ABSOLUT
(Pusat)

1. Urusan Wajib (24)

➤ Pelayanan Dasar (6)

- Pendidikan
- Kesehatan
- PU dan TR
- Perkim
- Trantib, Linmas
- Sosial

➤ Non Pelayanan Dasar (18)

- Naker
- Pemberdayaan PA
- Pangan
- Pertanahan
- LH
- Admindukcapil
- Pemberdayaan masy desa
- Dalduk & KB
- Perhubungan
- Kominfo
- KUKM
- Penanaman Modal
- Kepemudaan & OR
- Statistik
- Persandian
- Kebudayaan
- Perpustakaan
- Arsip

2. Urusan Pilihan (8)

- Kelautan & perikanan
- Pariwisata
- Pertanian
- Kehutanan
- ESDM
- Perdagangan
- Perindustrian
- Pariwisata

- a. Politik luar negeri;
- b. Pertahanan;
- c. Keamanan;
- d. Yustisi;
- e. Moneter dan fiskal nasional;
- f. Agama.

APBN

APBN
APBD



PENYUSUNAN RKA

01

Penyusunan RKA-K/L yang mengacu pada Renja dan RKP merupakan bagian dari penyusunan Rancangan APBN

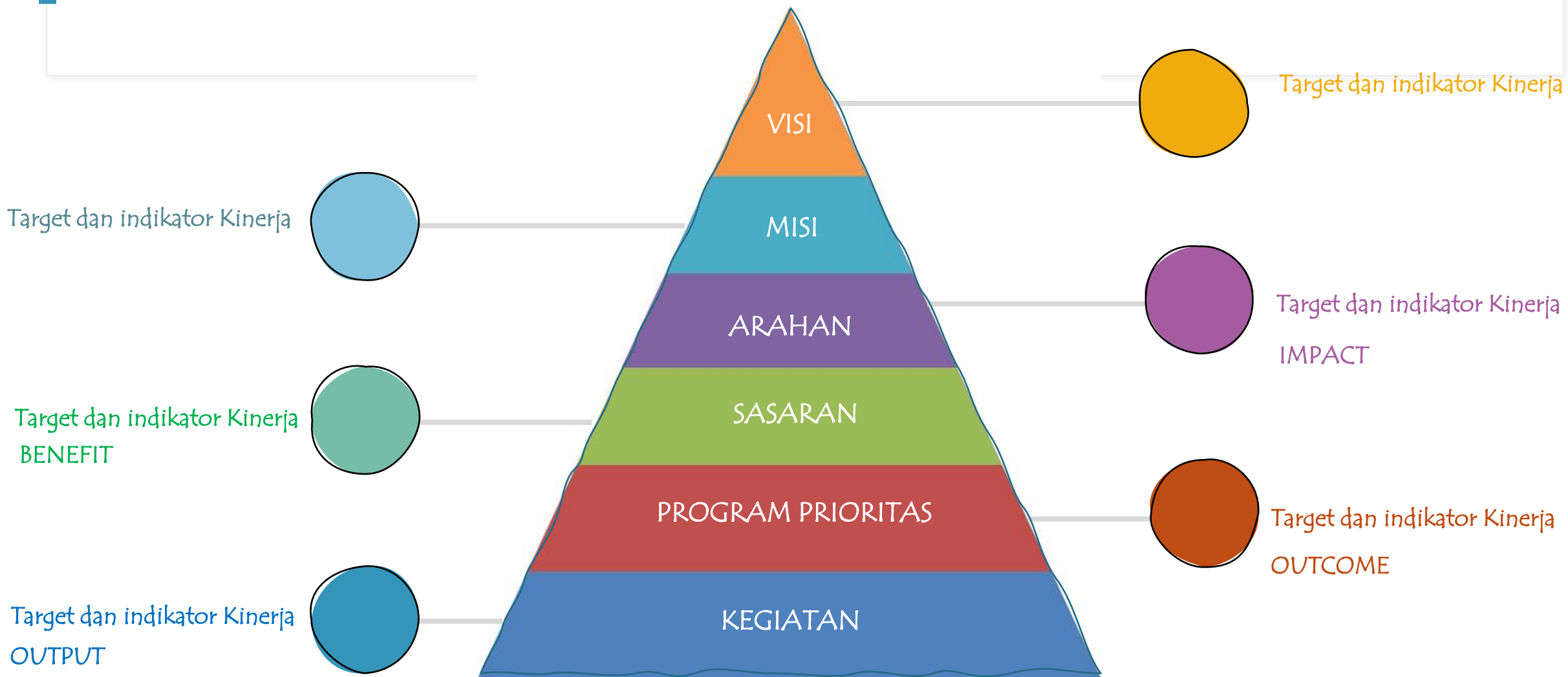
02

Disusun oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran

03

Dilakukan berdasarkan Pagu Anggaran K/L yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

Target Kinerja



APBN

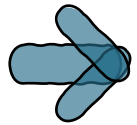
APBD



Apa yang dimaksud dengan APBD dan APBD..?



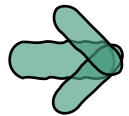
Pengertian APBN dan APBD



- UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR.

APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh DPRD.

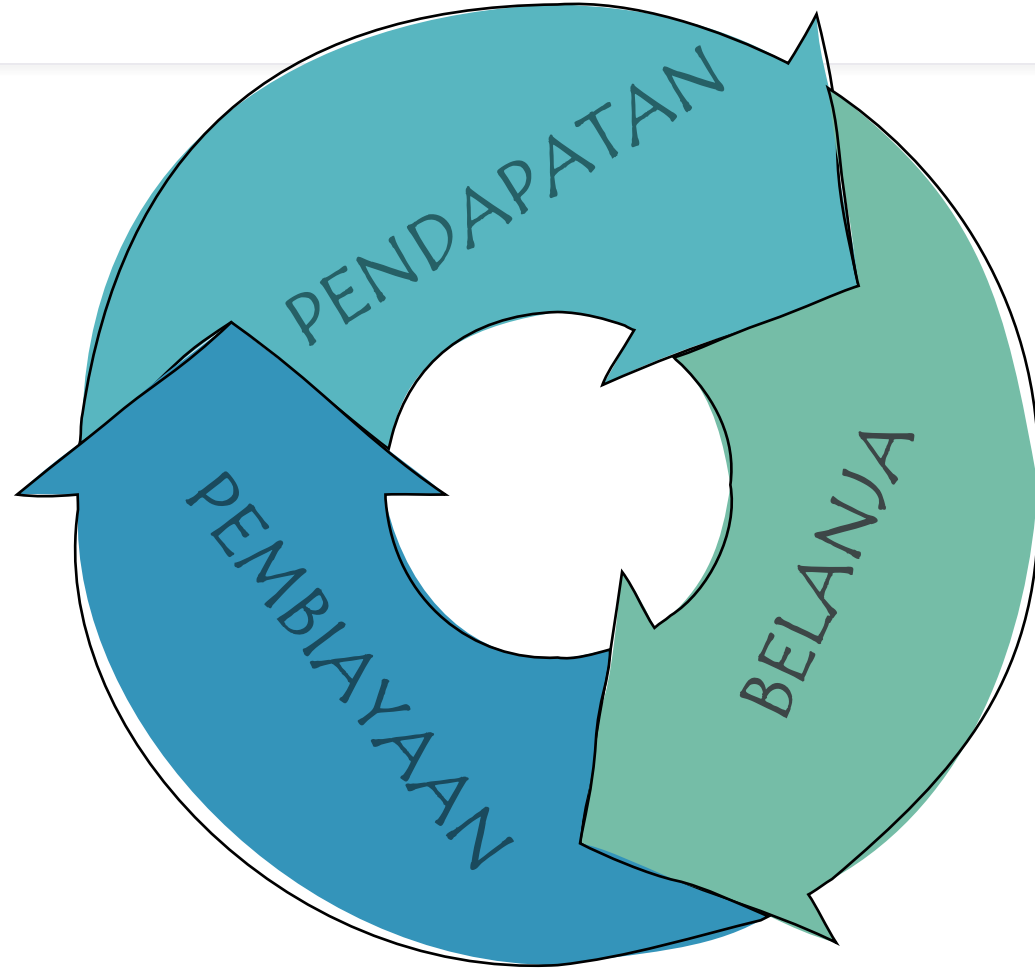


- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah

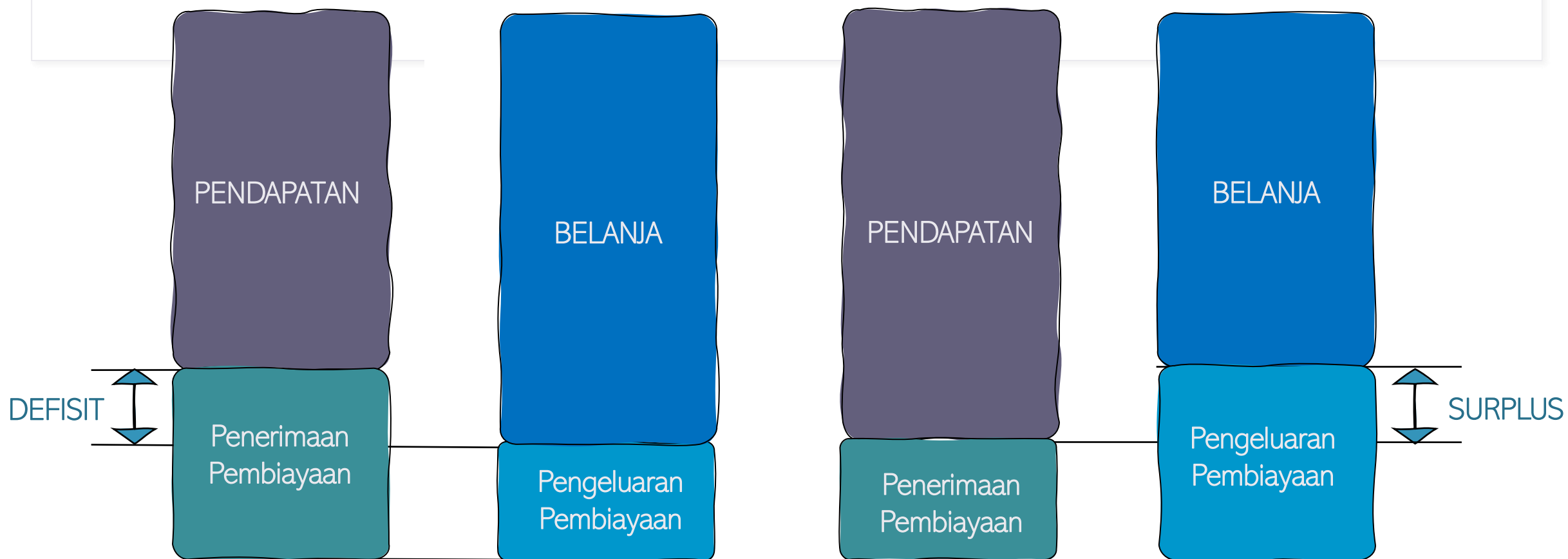
APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan UU.

APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Struktur APBN dan APBD



Logika APBN/APBD



$$\text{APBN/APBD} = \text{PENDAPATAN} + \text{Penerimaan Pembiayaan} = \text{BELANJA} + \text{Pengeluaran Pembiayaan}$$

SIKLUS APBN





Kebijakan Umum APBD –
Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(KUA PPAS)
Paling lambat disampaikan ke DPRD
Minggu 2 Juli

Banggar DPRD



Kebijakan Umum APBD –
Prioritas Plafon Anggaran
(KUA PPA)
Disepakati Gubernur dan DPRD
Minggu 2 Agustus

TAPD



Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA)
Satuan Kerja Pemerintah
Daerah (SKPD)

Gubernur



Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
(APBD)
disampaikan ke DPRD
paling lambat
minggu 2 September

DPRD



Rancangan APBD dibahas
DPRD dan ditetapkan
paling lambat
akhir November

Gubernur



Raperda APBD
Disampaikan ke Kemendagri
untuk dievaluasi dan
disampaikan kembali ke
Gubernur selambatnya
Pertengahan Desember

Mendagri



Raperda APBD
Diperbaiki oleh Gubernur
dan DPRD untuk ditetapkan
menjadi Perda APBD paling
lambat
akhir Desember

SKPD



APBD
Dilaksanakan

Dievaluasi



Referensi



BAPPEDA



MUSRENBANG
Kelurahan → Januari
Kecamatan → Februari
Kota/Kabupaten → Minggu 4 Maret
Provinsi → Minggu 2 April

TAPD



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
untuk pedoman penetapan
Rencana Kerja (Renja) SKPD
Ditetapkan paling lambat
akhir Juni

Siklus Penyusunan APBD



APBN 2021

**PERCEPATAN
PEMULIHAN
EKONOMI
DAN PENGUATAN
REFORMASI**

APBN 2021



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

INDONESIA MAJU

FOKUS APBN TAHUN 2021

1

Penanganan Kesehatan

Fokus vaksinasi, penguatan sarana & prasarana kesehatan, laboratorium, penelitian & pengembangan.

2

Perlindungan Sosial

Terutama bagi kelompok yang kurang mampu & rentan.

3

Pemulihan Ekonomi

Dukungan terhadap UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) & dunia usaha.

4

Reformasi Struktural

Bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dll.



Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan kembali menuju *trajectory* pertumbuhan jangka menengah, meskipun masih penuh ketidakpastian

2021 Outlook 2020
proyeksi per Oktober 2020



Faktor utama yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu penanganan Covid-19, dukungan stimulus fiskal untuk melanjutkan program PEN dalam rangka pemulihan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi global



Tingkat inflasi tahun 2021 dipengaruhi oleh pulihnya aktivitas konsumsi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.



Pemulihan ekonomi domestik di tahun 2021 akan semakin menarik arus modal masuk dan memperkuat Rupiah. Peluang pemulihan ekonomi negara maju, akan memengaruhi kondisi likuiditas di pasar global



Tingkat bunga SBN 10 tahun akan dipengaruhi antara lain oleh risiko ketidakpastian pasar keuangan global dan prospek membaiknya perekonomian Indonesia. Kerja sama otoritas fiskal dan moneter akan semakin diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

*) Dalam APBN 2021, Tingkat bunga SBN 10 tahun menggantikan tingkat bunga SPN 3 bulan



Faktor yang memengaruhi harga minyak dunia 2021 antara lain peluang perbaikan kondisi perekonomian global berdampak pada naiknya permintaan minyak di pasar komoditas minyak mentah global



Target *lifting* migas tahun 2021 akan dipengaruhi oleh potensi penurunan alamiah sumur-sumur *existing* dan optimalisasi *lifting* migas melalui peningkatan upaya teknis, reformasi birokrasi, serta perbaikan iklim usaha (*ease of doing business*)

Sasaran dan Indikator Pembangunan

Upaya meningkatkan kesejahteraan a.l ditunjukkan dengan kesepakatan untuk memperbaiki indeks Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan dalam APBN 2021



Tingkat Pengangguran (%)
2021: 7,7 – 9,1



Indeks Pembangunan Manusia
2021: 72,78 – 72,95



Gini Ratio
2021: 0,377 – 0,379



Kemiskinan (%)
2021: 9,2 – 9,7



Nilai Tukar Petani
2021: 102-104



Nilai Tukar Nelayan
2021: 102-104

Postur APBN

Mendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi

APBN 2021

(triliun Rupiah)

Defisit 5,7% terhadap PDB

	2020	2021
Pendapatan Negara	1.699,9	1.743,6
Penerimaan Perpajakan	1.404,5	1.444,5
Penerimaan Negara Bukan Pajak	294,1	298,2
Hibah	1,3	0,9
Belanja Negara	2.739,2	2.750,0
Belanja Pemerintah Pusat	1.975,2	1.954,5
Transfer ke Daerah & Dana Desa	763,9	795,5
Keseimbangan Primer	(700,4)	(633,1)
Defisit Anggaran	(1.039,2)	(1.006,4)
	(6,34) % thdp PDB	(5,70) % thdp PDB
Pembiayaan Anggaran	1.039,2	1.006,4

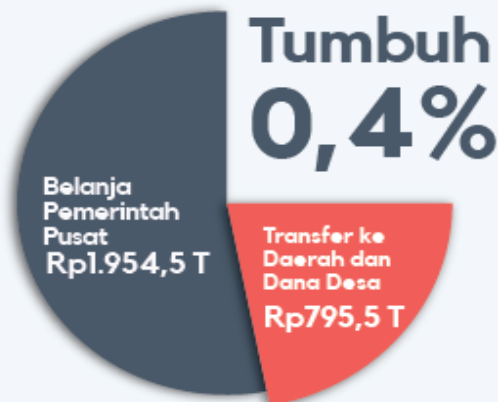
Pendapatan Negara

Rp1.743,6 T



Belanja Negara

Rp2.750,0 T



Defisit

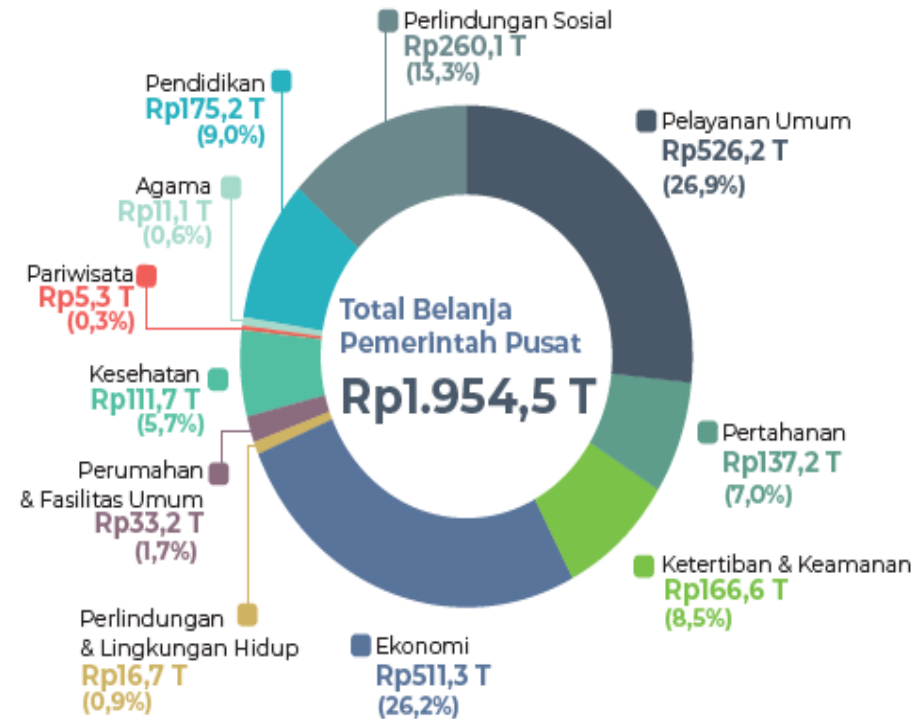
5,70% thd PDB
(2020: 6,34%)

Pembiayaan Anggaran

Rp1.006,4 T
(2020: Rp1.039,2 T)

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi

Komposisi menurut klasifikasi fungsi dipengaruhi oleh prioritas dan kebijakan Pemerintah, dengan mempertimbangkan kewenangan Pemerintah Pusat



26,9%

Fungsi pelayanan umum sejalan dengan upaya Pemerintah mendorong birokrasi serta layanan publik yang lebih tangkas, efektif, produktif, dan kompetitif, termasuk pemenuhan kewajiban Pemerintah

26,2%

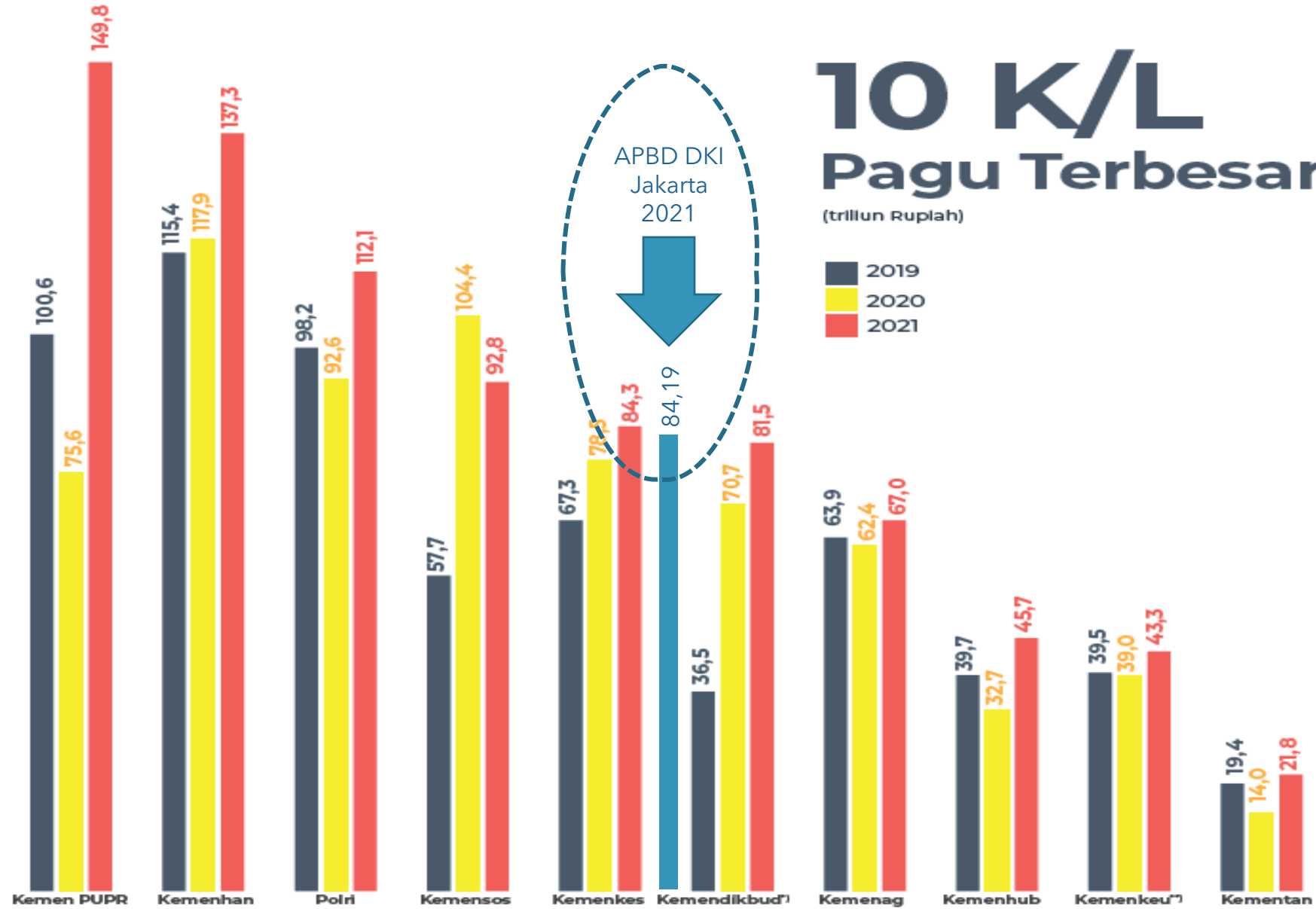
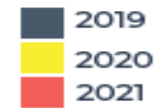
Fungsi ekonomi diarahkan untuk mendukung berbagai kegiatan Pemerintah dalam pembangunan ekonomi melalui peningkatan ketahanan pangan dan energi, pembangunan infrastruktur, serta pembangunan teknologi dan informatika.

13,3%

Fungsi perlindungan sosial difokuskan untuk membantu masyarakat bawah terutama dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19 yang diperkirakan masih akan berlanjut ke tahun 2021.

10 K/L Pagu Terbesar

(triliun Rupiah)





Hankam dan Hukum

Dukungan atas lembaga hankam dan penegak Hukum diberikan untuk peningkatan stabilitas nasional dalam pelaksanaan pembangunan dan pemulihan ekonomi



Kemenhan

Rp137,3 T

Pemenuhan, modernisasi, dan perawatan alutsista
Memelihara kestabilan pertahanan mendorong pemulihan ekonomi



KPK

Rp1,3 T

monitoring implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
Pengembangan Sistem Penanganan Perkara Pidana Korupsi mendukung SPPT-TI
Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi

Mahkamah Agung

Rp11,2 T

Peningkatan fungsi SPPT TI (Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi) di 283 pengadilan
Pengembangan prosedur beracara elektronik di pengadilan (*e-court*)



Polri

Rp112,1 T

Memperkuat stabilitas Polhukhankam mendorong pemulihan ekonomi
Modernisasi almatsus
Profesionalisme SDM

Kejaksaan

Rp9,6 T

Penanganan/penyelesaian pemulihan aset terkait tindak pidana
pembangunan ruang pemantauan serangan siber, dan pusat data SOC (*Secure Online Communication*)



TUGAS KELOMPOK

DISKUSIKAN dan PAPARKAN

1. RPJMN 2020-2024

- Visi Misi dan Arah Presiden → Identifikasi sasaran yang akan dicapai oleh kontribusi MA
- Identifikasi asasaran dan target kinerja yang menjadi tanggung jawab MA dalam Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
- Urutkan dalam tingkatan dari Visi, Misi, Arah, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi, Program Prioritas → Bandingkan dengan Renstra MA dan Kegiatan 2021

2. Pelajari isu aktual sesuai kasus :

- Apa kelemahan-kelemahan upaya penegakkan hukum yang terjadi saat saat ini ?
- Jika kelemahan dimaksud tidak segera ditangani apa dampak yang akan ditimbulkannya ?
- Identifikasi akar masalahannya kenapa hal itu terjadi !
- Apa alternatif solusi yang dapat dilakukan agar dapat memperkuat upaya penegakkan hukum di Indonesia dikaitkan dengan sasaran target kinerja dan pencapaian Visi Misi Presiden ?

VISI, MISI dan SASARAN

VISI PRESIDEN

Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

MISI

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Bertaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Ketajaman Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Pertindungan bagi segenap bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Desah dalam Kerangka Negara Kesatuan

ARAHAN PRESIDEN

1. Pembangunan SDM
2. Pembangunan Infrastruktur
3. Petyederhanaan Regulasi
4. Petyederhanaan Birokrasi
5. Transformasi Ekonomi

AGENDA PEMBANGUNAN

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjalin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Bertaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

No	Sasaran	Indikator	Baseline 2019	Target 2024
Menguatnya Stabilitas Polhukhankam dan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik				
3	Penegakan Hukum Nasional yang Mantap	1. Indeks Pembangunan Hukum	0,61 (2018)	0,73+
		2. Persentase <i>judicial review</i> yang dikabulkan (%)	13,15 dan 12,05 (2018)	8,15 dan 7,05
		3. Peringkat EoDB Indonesia untuk aspek penegakan kontrak	146	70
		4. Peringkat EoDB Indonesia untuk aspek penyelesaian kepailitan	36	20
		5. Peringkat EoDB Indonesia untuk aspek mendapatkan kredit	44	20
		6. Persentase pelaku residivis (%)	9,06	6,56
		7. Indeks Perilaku Anti Korupsi	3,70	4,14
		8. Indeks Akses terhadap Keadilan (%)	69,6	71-80

6 Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya

PROGRAM PRIORITAS MA

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembentukan ZI, WBK dan WBEM Wilayah III	Wilayah ZI, WBK dan WBEM yang dibentuk	5 Satker	5 Satker	5 Satker	5 Satker	5 Satker	3,7	Daerah	Kemenkumham	
Pembentukan ZI, WBK dan WBEM Wilayah IV	Wilayah ZI, WBK dan WBEM yang dibentuk	5 Satker	5 Satker	5 Satker	5 Satker	5 Satker	1,3	Daerah	Kemenkumham	
Pembentukan ZI, WBK dan WBEM Wilayah V	Wilayah ZI, WBK dan WBEM yang dibentuk	5 Satker	5 Satker	5 Satker	5 Satker	5 Satker	1,3	Daerah	Kemenkumham	
Pembentukan ZI, WBK dan WBEM Wilayah VI	Wilayah ZI, WBK dan WBEM yang dibentuk	5 Satker	5 Satker	5 Satker	5 Satker	5 Satker	1,3	Daerah	Kemenkumham	
Pengukuran tingkat kepuasan layanan publik persepsi anti korupsi dan ndeks integritas di Kemenkumham	Jumlah Laporan Pengukuran tingkat kepuasan layanan publik persepsi anti korupsi dan ndeks integritas di Kemenkumham	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	13,5	Pusat	Kemenkumham	
Sosialisasi Pedoman Peraturan Tipikor	Jumlah Sosialisasi Revisi Juknis Pedoman Peraturan Tipikor	31 Kegiatan	31 Kegiatan	31 Kegiatan	31 Kegiatan	31 Kegiatan	4,0	Pusat	Kejagung	
Peningkatan Zona Integritas Wilayah I	Peningkatan Zona Integritas Wilayah I	106 LHP	106 LHP	106 LHP	106 LHP	106 LHP	9,2	Daerah	MA	
Peningkatan Zona Integritas Wilayah II	Peningkatan Zona Integritas Wilayah II	83 LHP	83 LHP	83 LHP	83 LHP	83 LHP	6,1	Daerah	MA	
Peningkatan Zona Integritas Wilayah III	Peningkatan Zona Integritas Wilayah III	105 LHP	105 LHP	105 LHP	105 LHP	105 LHP	10,8	Daerah	MA	
Peningkatan Zona Integritas Wilayah IV	Peningkatan Zona Integritas Wilayah IV	53 LHP	53 LHP	53 LHP	53 LHP	53 LHP	6,8	Daerah	MA	
Pembangunan Zona Integritas	Pembangunan Zona Integritas	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	0,5	Pusat	MK RI	
Pendampingan Pembinaan Integritas menuju WBK/WBEM di Lingkungan Kejaksaan RI	Jumlah Satker yang Mendapat Pendampingan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBEM Lingkungan Kejaksaan RI	31 Satker	31 Satker	31 Satker	31 Satker	31 Satker	9,0	Daerah	Kejagung	
Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas	Jumlah Instansi yang dilakukakan Penilaian Integritas							Pusat	KPK	
Monitoring Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi	Jumlah Laporan tentang Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi							Pusat	KPK	
ProP : Optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Pelatihan Pemulihan Aset									
Diklat Pemulihan Aset	Jumlah Angkatan Diklat Pemulihan Aset							Pusat	Kejagung	
Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang terkait Tindak Pidana	Jumlah Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang terkait Tindak Pidana							Pusat	Kejagung	
KP : Peningkatan Akses terhadap Keadilan	Indeks Akses terhadap Keadilan	65-70%	65-70%	71-80%	71-80%	71-80%	573,6			
ProP : Penguatan layanan keadilan	Indeks Akses terhadap Keadilan	65-70%	65-70%	71-80%	71-80%	71-80%	567,6			

Peningkatan Zona Integritas Wilayah I
Peningkatan Zona Integritas Wilayah II
Peningkatan Zona Integritas Wilayah III
Peningkatan Zona Integritas Wilayah IV

PROGRAM PRIORITAS MA

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP) / PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR		ALOKASI BUDAYA (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
Layanan Pos Bantuan Hukum	Jumlah Jam Layanan Pos Bantuan Hukum	Layanan Pos Bantuan Hukum	55,8	Pusat		MA
Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan	Jumlah Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan	Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan	26,4	Pusat		MA
Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	Jumlah Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	0,4	Pusat		MA
Perkara ditingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya perkara	Jumlah Perkara ditingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya perkara	Perkara ditingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya perkara	20,4	Pusat		MA
Perkara ditingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung	Jumlah Perkara ditingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung	Perkara ditingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung	58,7	Pusat		MA
Layanan Bantuan Hukum ditingkungan Peradilan Agama	Jumlah Layanan Bantuan Hukum ditingkungan Peradilan Agama	Layanan Bantuan Hukum ditingkungan Peradilan Agama	58,2	Pusat		MA
Perkara ditingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang Terpadu	Jumlah Perkara ditingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang Terpadu	Perkara ditingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang Terpadu	3,6	Pusat		MA
Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	Jumlah Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	0,1	Pusat		MA
Pos Bantuan Hukum	Jumlah Jam Layanan Pos Bantuan Hukum	Layanan Bantuan Hukum	4,8	Pusat		MA
Rekomendasi untuk pelaksanaan dukungan pengakuan, penghargaan dan perlindungan yang mendukung kerja-kerja perempuan pembela HAM	Jumlah Rekomendasi untuk pelaksanaan dukungan pengakuan, penghargaan dan perlindungan yang mendukung kerja-kerja perempuan pembela HAM	Perkara ditingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang Terpadu	2,5	Pusat		Kontras Perempuan
Kegiatan Bantuan Hukum non Litigasi	Jumlah Orang Pembinaan Hukum non Litigasi	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	286,6	Daerah		Kemenkumham
Prop : Pemberdayaan Hukum bagi Masyarakat	Indeks Akses terhadap Keadilan	Pos Bantuan Hukum	50,1	Daerah		Kemenkumham
Penyusunan Standar Norma dan Setting HAM	Jumlah Penyusunan Standar Norma Setting HAM		6,0			
PP : REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA	Persentase Instansi Pemerintah (Kementerian/Lembaga) dengan Indeks RB Baik Keatas		6,0	Pusat		Kontras HAM
			14.765,8			

POST-TEST



<https://www.wirakarta.com>



TERIMA KASIH

